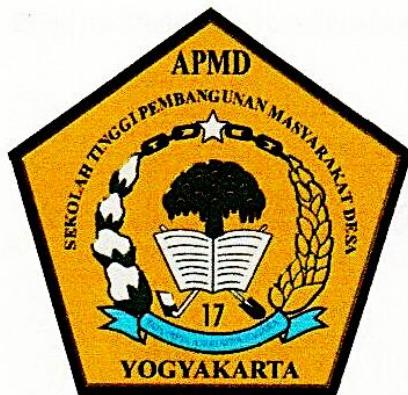


**PEMERINTAH DESA DALAM FASILITASI MITIGASI BENCANA
GUNUNG MERAPI**

(Penelitian di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

Diva Fajarwati

21520072

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**



HALAMAN JUDUL

PEMERINTAH DESA DALAM FASILITASI MITIGASI BENCANA GUNUNG MERAPI

(Penelitian di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

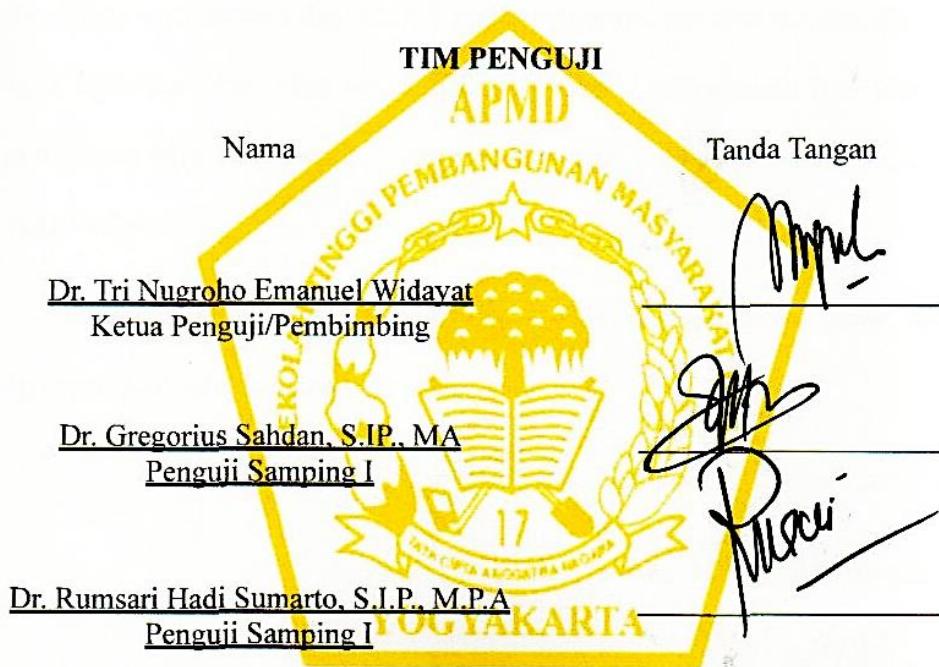
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Fajarwati

Nim : 21520072

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemerintah Desa dalam Fasilitasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar dan sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Diva Fajarwati
21520072

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Diva Fajarwati
NIM : 21520072
Telp : 085711527715
Email : divafajarwati@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pemerintah Desa dalam Fasilitasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi" Penelitian di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



MOTTO

“*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*”

(Al-Insyirah 5-6)

“*I'll await my armored fate with smile, still wanna try still believe in good days*”

(SZA-Good Days)

“Bagaimanapun juga merawat cita-cita tak akan semudah berkata-kata,
rencana berikutnya rajut lagi cerita, merapal doa, gas sekencangnya!”

(Fstvlst-Gas)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang sangat luar biasa. Atas izin-Nya, memperkenankan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh cinta dan syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mugiyanto dan Ibu Rini Sunarti, tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada saya dengan penuh cinta. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, ketulusan, dukungan serta doa-doa yang dilangitkan dan tidak pernah berhenti terucap untuk membimbing dalam meraih impian dan cita-cita. Terima kasih sudah membersamai saya dan selalu mendengarkan keluh kesah saya dan membuat saya selalu bangkit dan menjadi lebih kuat, semua yang saya lakukan sampai hari ini dan selamanya akan saya dedikasikan untuk Bapak dan Ibu.
2. Adik-adikku terkasih Dian Wahyu Rizmawanto dan Dio Putra Pamungkas, terima kasih sudah ikut serta dalam proses saya menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas dukungan, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada saya. Tumbuhlah menjadi versi terbaik dan terhebat adik-adikku.
3. Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemerintah Desa dalam Fasilitasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi (Penelitian di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)” dengan baik. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah menjadi suri tauladan bagi peneliti. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan segala doa, pengorbanan, dukungan serta rasa kasih sayang kalian yang tiada henti.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang istimewa ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Shadan, S.I.P., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

3. Dr. Tri Nugroho, E.W selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, semangat, dan motivasi selama penulisan skripsi ini. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga, saya berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
4. Dr. Gregorius Shadan, S.I.P., M.A selaku Pengaji I yang telah mengarahkan, memberi saran, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A selaku Pengaji II yang telah mengarahkan, memberi saran, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing saya selama perkuliahan.
7. Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dan masyarakat Kepuharjo yang telah mengizinkan dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih untuk segala dukungan, doa, bantuan, wejangan, dan terima kasih sudah bersamai saya, untuk bertukar pikiran, untuk saling memotivasi baik dalam perkuliahan maupun persahabatan.
9. Untuk semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu dan menghibur saya dalam keadaan apapun.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi pedoman dan acuan penulis di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan ilmiah, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 18 Februari 2025



Diva Fajarwati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
E. Literatur Review.....	6
F. Kerangka Konseptual	16
1. Pemerintah Desa.....	16
2. Fasilitasi.....	24
3. Mitigasi Bencana.....	30
G. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Unit Analisis.....	38
3. Teknik Pengumpulan Data	39
4. Teknik Analisis Data	41
BAB II BENCANA GUNUNG MERAPI DI KEPUHARJO	42
A. Sejarah Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi.....	42
B. Erupsi Gunung Merapi 2010.....	44
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN KEPUHARJO DALAM MITIGASI BENCANA GUNUNG MERAPI	51
A. Pemetaan Risiko Bencana.....	51

B.	Koordinasi dan Kerjasama	58
C.	Rekonstruksi.....	63
BAB IV	PENUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR	PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	39
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Korban Erupsi Merapi 2010.....	47
Gambar 2. 2 Hunian Sementara/Shelter.....	48
Gambar 2. 3 Hunian Tetap Batur dan Pagerjurang	48
Gambar 3. 1 Sosialisasi dan Kontijensi Bencana Erupsi Merapi 2022.....	53
Gambar 3. 2 Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Hujan Gunung Merapi.....	55
Gambar 3. 3 Rapat Koordinasi Maret 2023	59
Gambar 3. 4 Standar Operasional Prosedur Peringatan Dini	62
Gambar 3. 5 Sistem Peringatan Dini Erupsi Merapi.....	63

INTISARI

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, yang sering mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya frekuensi erupsi, pemahaman dan tindakan mitigasi yang efektif oleh pemerintah desa menjadi krusial untuk melindungi warga dan mengurangi risiko bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemerintah Desa Kepuharjo dalam fasilitasi mitigasi bencana Gunung Merapi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pemerintah Desa Kepuharjo dalam fasilitasi mitigasi bencana Gunung Merapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala desa dan masyarakat, serta dokumen terkait pelaksanaan mitigasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Kepuharjo telah melakukan pemetaan risiko bencana, mengatur proses evakuasi yang terstruktur, serta melakukan rekonstruksi pasca bencana yang melibatkan partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam upaya mitigasi bencana.

Kata Kunci: Fasilitasi, Mitigasi Bencana, Pemerintah Desa.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, yang menimbulkan risiko bencana yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Letusan gunung berapi dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang mendalam, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian dan pariwisata sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Gunung Merapi telah mengalami beberapa erupsi besar, yang berdampak pada masyarakat sekitarnya. Karakteristik letusan Gunung Merapi yang eksplosif melepaskan lahar, abu vulkanik, dan awan panas yang berbahaya. Korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan perubahan lanskap telah disebabkan oleh erupsi-erupsi ini.

Desa Kepuharjo merupakan desa yang termasuk ke dalam Desa Tangguh Bencana. Oleh karena itu upaya fasilitasi pemerintah desa dalam mitigasi bencana harus diperhatikan mengingat Desa Kepuharjo merupakan wilayah yang sangat rawan terkena dampak bencana gunung merapi. Pemerintah desa sangat memiliki peran yang penting untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman Gunung Merapi. Pemerintah desa juga bertanggung jawab atas semua aspek mitigasi bencana, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana yang diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Salah satu

landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menetapkan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam undang-undang ini, diharapkan pemerintah desa turut berperan aktif, menekankan pentingnya peran mereka sebagai bagian dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokal, termasuk dalam konteks mitigasi bencana. Pasal 19 dari undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi dan penanggulangan bencana, yang sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana. Dalam hal ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk menganggarkan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga desa memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program penting.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk desa dalam menyusun rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam implementasinya, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

masyarakat melalui pelatihan dan penyusunan rencana kerja yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) juga mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pemerintah, dan organisasi untuk memperkuat penanggulangan bencana di tingkat lokal.

Pemerintah Desa Kepuharjo telah mengambil langkah penting dalam mitigasi bencana Gunung Merapi dengan menyediakan barak evakuasi dan jalur evakuasi yang memadai. Infrastruktur ini sangat penting untuk memastikan keselamatan masyarakat saat terjadi bencana. Namun, keberadaan fasilitas tersebut saja tidak cukup untuk menjamin kesiapsiagaan yang optimal. Tanpa adanya sistem peringatan dini yang efektif, masyarakat tetap berisiko tinggi dalam mengadapi situasi darurat tanpa informasi yang memadai tentang ancaman yang akan datang.

Banyak masyarakat di Kalurahan Kepuharjo yang masih minim pengetahuan tentang informasi mitigasi bencana, khususnya terkait dengan potensi erupsi Gunung Merapi. Beberapa warga bahkan belum pernah mengikuti simulasi atau pelatihan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana tersebut. Selain itu, penyebaran informasi mengenai aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih sangat terbatas. Seringkali masyarakat mendapatkan informasi bukan dari pemerintah desa, melainkan melalui sumber-sumber lain. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, karena ketidakpastian dan kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi darurat.

Mengingat bahwa Desa Kepuharjo merupakan kawasan wisata yang dikunjungi banyak pengunjung, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah desa dapat memfasilitasi pengembangan sistem peringatan dini yang lebih baik. Sistem ini tidak hanya akan memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat mengenai potensi bahaya, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk wisatawan. Dengan demikian, upaya fasilitasi pemerintah desa dalam mitigasi bencana dapat lebih optimal, mengurangi risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan keselamatan warga desa dan pengunjung secara keseluruhan.

Kurangnya sumber daya manusia di Desa Kepuharjo menjadi tantangan signifikan dalam upaya mitigasi bencana yang terkait dengan aktivitas Gunung Merapi. Banyak warga dan aparat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam manajemen risiko bencana vulkanik. Tanpa adanya pemahaman yang baik, upaya penanggulangan yang dilakukan menjadi kurang optimal, sehingga potensi kerugian, baik materiil maupun nyawa tetap tinggi.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap risiko yang ditimbulkan oleh Gunung Merapi juga masih rendah. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami potensi bahaya, seperti awan panas atau letusan yang tiba-tiba, dan tidak menyadari pentingnya kesiapsiagaan. Kurangnya partisipasi dalam program-program mitigasi yang diinisiasi oleh pemerintah desa membuat upaya tersebut kurang efektif. Tanpa dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat, langkah-langkah penanggulangan bencana yang diambil akan sulit untuk diimplementasikan secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai strategi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan dan praktik mitigasi bencana yang lebih efektif di tingkat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Pemerintah Desa Kepuharjo dalam fasilitasi mitigasi bencana Gunung Merapi?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini melihat Pemerintah Desa dalam fasilitasi mitigasi bencana Gunung Merapi dari aspek:

1. Pemetaan Resiko Bencana
2. Koordinasi dan Kerjasama
3. Rekontruksi

D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

Untuk mendeskripsikan fasilitasi Pemerintah Desa Kepuharjo dalam mitigasi bencana Gunung Merapi.

2. Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan fasilitasi pemerintah desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan fasilitasi pemerintah desa dalam mitigasi bencana.

c. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara langsung penerapan pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan pengalaman.

E. Literatur Review

Pada penelitian ini, penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Handina Pamuji dan Evi Widowati dalam yang berjudul *Penerapan Program Mitigasi Bencana Lereng Gunung Merapi*. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonokerto dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan program mitigasi bencana di Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman. Peneliti memilih informan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait dengan topik penelitian. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen, termasuk pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar studi dokumen. Teknik triangulasi sumber diterapkan untuk memeriksa keabsahan data, memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dapat saling mendukung dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi program mitigasi bencana di desa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mitigasi bencana di Desa Wonokerto, pentingnya pemetaan risiko bencana, koordinasi, dan kerjasama diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam membangun ketahanan masyarakat. Pemetaan risiko dilakukan melalui pengkajian yang mengidentifikasi potensi ancaman, seperti erupsi Gunung Merapi. Hasil dari pengkajian ini digunakan untuk menyusun strategi mitigasi yang tepat, membantu masyarakat memahami tingkat risiko yang dihadapi. Selain itu, koordinasi teknis dalam penanganan bencana diatur dengan kepala desa sebagai penanggung jawab, memastikan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak. Dukungan dari lembaga luar seperti LSM dan keterlibatan komunitas lokal juga diperkuat melalui pembentukan forum pengelola risiko bencana, yang menggabungkan berbagai elemen

masyarakat dan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko. Dalam hal rekonstruksi, Desa Wonokerto mengimplementasikan langkah-langkah pemulihan aset dan infrastruktur yang rusak akibat bencana, yang tercermin dalam dokumen perencanaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Langkah mitigasi struktural, seperti pembangunan sarana air bersih dan infrastruktur lainnya, juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi risiko di masa depan. Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan upaya terpadu untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. (Pamuji & Widowati, 2021).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhana Januar Mahardhani, Iqbal Akbar Imamudin, dan Fendy Eko Hardiwan yang berjudul *Upaya Mitigasi Bencana Melalui Dayakan Mitigation Center (DMC)*. Penelitian ini dilakukan di Desa Dayakan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode pengabdian masyarakat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang melakukan serangkaian aktivitas untuk mengimplementasikan aplikasi Dayakan Mitigation Center (DMC) sebagai upaya mitigasi bencana.

Hasil penelitian menunjukkan upaya mitigasi bencana di Desa Dayakan, memiliki koordinasi yang efektif antara berbagai pihak. Pembentukan Tim Dayakan Mitigation Center (DMC) yang terdiri dari 28 anggota, dipimpin oleh Sekretaris Desa, merupakan langkah awal dalam menciptakan sinergi dalam penanggulangan bencana. Kegiatan sosialisasi program DMC dilaksanakan dua kali, melibatkan pemerintah desa, staf, dan perwakilan

dari kelompok masyarakat seperti karang taruna dan tim Tagana. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi. Selain itu, kolaborasi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan pemerintah desa penting untuk memastikan keberlanjutan aplikasi DMC. Evaluasi dan monitoring secara berkala yang melibatkan kedua pihak juga dilakukan untuk memperbaiki program dan memastikan koordinasi yang baik. Dengan demikian, komunikasi yang lancar dan kerjasama yang kuat antara semua pihak terlibat menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi aplikasi DMC dan upaya mitigasi bencana di Desa Dayakan. (Mahardhani, Imamudin, & Herdiawan, 2021).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Admiral Musa Julius, Nrangwesthi Widyaningrum, Ainun Najib, Andi Ahmad, Aminullah, Hani Syarifah, Hendro Pratikno, Ifad Fadlurrahman, Khairunnisa Adri, Tego Suroso, Rizkia Mutiara Ramadhani dan I Dewa Ketut Kerta Wardana yang berjudul Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dalam upaya mitigasi bencana, pemetaan risiko bencana menjadi salah satu komponen penting yang dibahas dalam jurnal ini. Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Desa Gunung Geulis telah melakukan pemetaan dan analisis risiko bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi pasif. Meskipun telah dilakukan, terlihat bahwa belum ada dokumen resmi yang tersusun untuk mendokumentasikan hasil pemetaan

tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam sistem dokumentasi agar informasi mengenai risiko bencana dapat lebih efektif digunakan untuk perencanaan dan tindakan mitigasi di masa depan. Selain itu, koordinasi dan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat juga menjadi fokus dalam implementasi program Desa Tangguh Bencana. Pembentukan forum PRB yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok wanita mencerminkan upaya kolaboratif dalam pengurangan risiko bencana. Jurnal ini mencatat bahwa Desa Gunung Geulis telah menjalin kerjasama dengan desa lain, kecamatan, dan pihak swasta untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam upaya mitigasi, serta untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif dalam menghadapi ancaman bencana. (Julius, et al., 2020).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rinawati dan Mu'awanah Sukmawati yang berjudul Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan risiko bencana di Desa Kembang diidentifikasi sebagai salah satu komponen penting dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana). Desa Kembang telah melaksanakan analisis risiko bencana yang menghasilkan peta jalur evakuasi dan tempat pengungsian, yang menunjukkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Pemetaan ini tidak

hanya berfungsi sebagai alat untuk mempersiapkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan potensi ancaman yang ada. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang mengetahui keberadaan peta dan kajian risiko tersebut, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam penyebaran informasi. Selain itu, pentingnya koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana juga sangat penting. Keberhasilan program Destana di Desa Kembang tidak terlepas dari dukungan kolaboratif antara pemerintah desa, tim siaga tanggap bencana, serta masyarakat setempat. Koordinasi yang baik di antara semua pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya mitigasi dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dan sinergi antara pemerintah dan komunitas sangat penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana. (Rinawati & Sukmawati, 2020).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Najib dan Hayatul Khairul Rahmat yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau*. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data melalui wawancara dengan teknik semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai partisipasi masyarakat dan pengelolaan risiko bencana di Desa Buluh Cina. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif analitik, memberikan kejelasan terhadap realitas yang

ada. Hasil penelitian menunjukkan program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, pemetaan risiko bencana menjadi salah satu aspek krusial yang dibahas. Desa ini telah melakukan pemetaan dan analisis risiko, termasuk penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana serta rencana aksi pengurangan risiko bencana. Peta bahaya banjir di Provinsi Riau turut menjadi referensi penting dalam mengidentifikasi potensi ancaman yang dihadapi oleh masyarakat desa. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan risiko bencana tetapi juga memfasilitasi perencanaan yang lebih efektif dalam menghadapi bencana. Selain itu, koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak juga sangat ditekankan dalam pelaksanaan program ini. Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Desa Buluh Cina berperan aktif dalam melibatkan masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan, untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Kerjasama ini terbukti penting dalam memperkuat kapasitas desa untuk mengelola risiko bencana, di mana forum PRB rutin mendapat pembinaan dari BPBD Kabupaten Kampar. Kolaborasi ini tidak hanya menciptakan sinergi yang lebih baik dalam penanganan bencana tetapi juga memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. (Najib & Rahmat, 2021).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mujianto, Jenni Ria Rajagukguk, dan Irwan Prasetyo yang berjudul *Mitigasi Bencana Berbasis Sister Village di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai manajemen risiko melalui program "sister village". Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial tertentu dengan cara yang sistematis dan akurat. Analisis data dilakukan secara induktif, dimana data yang diperoleh dianalisis untuk menemukan pola hubungan yang kemudian dapat disimpulkan secara umum. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pemetaan dan analisis ancaman serta penilaian kerentanan untuk menentukan lokasi penampungan pengungsi dan memahami kebutuhan yang harus dipenuhi saat terjadi bencana. Melalui pemetaan yang tepat, desa-desa dapat lebih siap dalam menghadapi potensi ancaman, sehingga dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan. Selain itu, jurnal ini juga membahas pentingnya koordinasi dan kerjasama antar desa dalam program "Sister Village." Program ini merupakan upaya kolaboratif antara desa-desa yang terdampak bencana dengan desa yang aman, bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan pengungsi dan evakuasi yang lebih terencana. Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan BPBD, yang bekerja sama untuk mempersiapkan tempat pengungsian dan memastikan proses evakuasi berjalan lancar. Dengan adanya koordinasi yang baik, kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat ditingkatkan secara efektif. (Mujiyanto, Rajagukguk, & Prasetyo, 2023).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah yang berjudul *Analisis Mitigasi Bencana Gunung Merapi di Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang* pada tahun 2021. Penelitian ini

menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan informan. Pendekatan ini dirancang untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan mitigasi bencana Gunung Merapi di Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Peneliti mengidentifikasi dan mengkaji tiga tahap dalam mitigasi bencana, yaitu penilaian bahaya, peringatan, dan persiapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana di Desa Srumbung terdiri dari tiga tahap. Pada tahap penilaian bahaya, desa telah mengidentifikasi populasi dan aset serta memantau tingkat ancaman bencana melalui informasi dari pos pantau Merapi, yang menunjukkan bahwa Desa Srumbung termasuk dalam kawasan rawan bencana III. Pada tahap peringatan, pemerintah desa memberikan informasi peringatan kepada setiap dusun menggunakan alat komunikasi seperti HT, kentongan, dan Toa masjid. Di tahap persiapan, pemerintah desa mempersiapkan tempat pengungsian dan fasilitas pendukung, serta merekomendasikan pembentukan desa bersaudara dengan Desa Tersan Gede dan Baturono. Beberapa fasilitas yang dipersiapkan mencakup gedung tempat evakuasi, MCK, dan dapur umum, serta pembangunan fisik seperti DAM untuk menahan aliran lahar dingin dan upaya reboisasi untuk mencegah longsor (Khasanah, 2021).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Agus Tiani yang berjudul *Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) “Sapto Manunggal” di Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari di Kabupaten Pacitan*. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, khususnya mengenai mitigasi bencana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan kunci yang terkait dengan pengelolaan risiko bencana dan melakukan observasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi bencana di daerah yang diteliti melibatkan beberapa strategi. Pertama, terdapat identifikasi risiko dan potensi ancaman yang dihadapi oleh masyarakat. Kedua, dilakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan dan sosialisasi. Ketiga, penelitian menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Selain itu, penelitian juga mencatat adanya tantangan dalam pelaksanaan mitigasi, seperti kurangnya sumber daya dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persiapan bencana (Tiani, 2021).

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisisnya. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pelaksanaan mitigasi bencana dengan menyoroti khusus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Sementara itu, penelitian ini akan mengambil pendekatan yang lebih mendalam dengan menganalisis upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor pendukung yang dapat memperkuat upaya tersebut serta faktor-faktor penghambat yang mungkin menghalangi efektivitas mitigasi bencana di

tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pemerintah desa dalam konteks mitigasi bencana

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Desa

Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan atau Pemerintah Desa (Diptya, 2022).

Dalam (Mardikanto, 2019) menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola berbagai urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa berperan penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Mereka bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan warga. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mereka harus mendengarkan aspirasi dan keluhan warga, serta melibatkan mereka dalam

proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, masyarakat merasa lebih diberdayakan dan memiliki andil dalam pembangunan desa mereka.

Pemerintah desa juga berfungsi sebagai penghubung antara warga dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Mereka menyampaikan informasi, kebijakan, dan program-program dari pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat, sekaligus mengkomunikasikan kebutuhan dan masalah desa kepada pihak yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, pemerintah desa memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di lingkungan desa. Dengan kewenangan yang mereka miliki, mereka dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

Menurut Marzuki dalam (Wahid, et al., 2009) Pemerintah desa merupakan lembaga yang sangat penting dalam struktur pemerintahan di tingkat lokal. Tugas utama mereka adalah mengelola berbagai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh warga. Selain itu, pemerintah desa berperan sebagai penghubung vital antara masyarakat dan pemerintah daerah, memastikan bahwa suara dan aspirasi warga dapat didengar dan diperhatikan.

Pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi dan pelayanan publik, tetapi juga aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan lokal. Ini berarti mereka harus memahami secara mendalam berbagai isu yang dihadapi masyarakat, mulai dari pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan

sosial. Dengan peran ini, pemerintah desa menjadi tempat di mana warga dapat menyampaikan keluhan, saran, dan ide-ide untuk perbaikan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang demokratis dan responsif, di mana setiap individu merasa dihargai dan didengarkan. Pemerintah desa harus mampu mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dapat meningkat. Dengan cara ini, diharapkan akan terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan warganya, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup di desa.

Pemerintah desa bisa dipahami sebagai lembaga yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola berbagai sumber daya yang ada di desa. Menurut (Supriadi, 2021), pemerintah desa memainkan peran krusial dalam proses pembangunan desa dan dalam memberdayakan masyarakat setempat. Mereka bertugas untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya, tetapi juga harus peka terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka perlu mendengarkan aspirasi warga agar program-program yang dijalankan benar-benar bermanfaat. Hal ini mencakup segala hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, hingga peningkatan layanan sosial.

Pentingnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat juga berarti bahwa mereka harus berusaha untuk menciptakan

peluang bagi warganya agar bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Misalnya, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, pemerintah desa bisa memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa bukan hanya sekadar pengelola, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat untuk berkembang dan berkolaborasi dalam membangun desa mereka. Hal ini merupakan langkah penting untuk menciptakan desa yang lebih mandiri dan sejahtera.

Selain itu, Menurut Sari dalam (Maulida, 2021) mengemukakan bahwa pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan yang lebih luas, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menjalankan fungsi ini dengan cara memberikan pelayanan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa berperan sebagai garda terdepan dalam memenuhi berbagai kebutuhan warganya. Misalnya, dalam bidang kesehatan, mereka harus memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia dan mudah diakses oleh semua orang. Ini bisa berarti menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mengadakan program kesehatan yang edukatif dan preventif, seperti penyuluhan tentang pola hidup sehat. Dalam bidang pendidikan, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat, menyediakan pelatihan

bagi guru, atau bahkan mengadakan program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu. Dengan cara ini, pemerintah desa berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih terdidik dan siap bersaing di masa depan.

Begitu juga dalam hal infrastruktur, pemerintah desa perlu memastikan bahwa jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dalam kondisi baik. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memudahkan akses, pemerintah desa membantu warga untuk menjalankan usaha, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, pemerintah desa harus mampu mendengarkan suara masyarakat. Dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program, mereka bisa lebih memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ini juga membantu menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap desa. Melalui pelayanan publik yang efektif dan efisien, pemerintah desa tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, mereka bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, di mana semua warga merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa mereka.

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan, administrasi, dan pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa berperan dalam melaksanakan

pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya di wilayah desa. Pemerintah desa umumnya terdiri dari:

- a. Kepala Desa: Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa. Mereka dipilih melalui pemilihan kepala desa yang melibatkan partisipasi masyarakat desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam mengambil keputusan, mengoordinasikan kegiatan pemerintahan desa, serta mewakili desa dalam hubungan dengan pihak lain.
- b. Perangkat Desa: Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas menjalankan administrasi dan melaksanakan kebijakan pemerintah desa. Mereka dipimpin oleh kepala desa dan terdiri dari berbagai posisi seperti sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan, dan posisi lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.

Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola anggaran desa, menyusun perencanaan pembangunan desa, memberikan pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mereka juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa serta mempertahankan adat dan tradisi lokal.

Pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga otonom dengan kewenangan tertentu yang diberikan oleh undang-undang. Mereka bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam melaksanakan program-program pembangunan yang lebih luas.

Pemerintah Desa memiliki berbagai tugas dan fungsi dalam (Asma, Mone, & Burhanudin, 2021) diantaranya:

- a. Pengaturan: Pemerintah Desa memiliki tugas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sedniri berdasar pada adat dan asal usul setempat.
- b. Pelaksanaan Pembangunan: Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang meliputi pengaturan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pelaksanaan tugas pembantuan: Pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
- d. Pelaksanaan Administrasi: Pemerintah desa melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, dan pendataan.
- e. Pelaksanaan Teknis: Pemerintah desa memiliki unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas operasional.
- f. Pelaksana kewilayahan: pemerintah desa memiliki pelaksana kewilayahan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- g. Pelaksanaan keuangan: pemerintah desa memiliki tugas dalam mengatur dan mengurus kepentingan keuangan desa, yang meliputi pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan penyimpanan keuangan.
- h. Pelaksana pengawasan: pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- i. Pelaksanaan pemberdayaan: pemerintah desa bekerjasama dengan BPD untuk mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat desa.

Peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintah desa dalam (Sugiman, 2018), yaitu:

- a. Peranan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang mencakup seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Peranan pemerintah desa menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- d. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah desa memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di tingkat desa. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan, administrasi, dan pengelolaan urusan pemerintahan di desa. pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga otonom dengan kewenangan tertentu yang diberikan oleh undang-undang. Mereka bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam melaksanakan program-program pembangunan yang lebih luas. Kepala desa adalah pemimpin tertinggi di tingkat desa yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, koordinasi kegiatan pemerintahan desa, dan perwakilan desa dalam hubungan dengan pihak lain. Sementara itu, perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas menjalankan administrasi dan melaksanakan kebijakan pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki berbagai tugas dan fungsi,

termasuk pengaturan urusan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan tugas pembantuan, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tugas teknis, pelaksanaan tugas kewilayahan, pengelolaan keuangan desa, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peran pemerintah desa juga meliputi pengelolaan keuangan desa, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa.

2. Fasilitasi

Fasilitasi menurut (Hunter et al, 1993) dalam (Achmad, 2018) merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya proses dalam melakukan suatu tindakan, fokus utamanya terletak pada cara menjalankan suatu aktivitas, bukan hanya pada hasil akhir atau isi dari suatu kegiatan tersebut. Dalam fasilitasi terdapat pemandu yang memfasilitasi jalannya proses, yaitu fasilitator. Fasilitator ini memiliki peran yang sangat penting, selain membantu individu atau kelompok untuk merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mengikuti setiap tahapan proses kegiatan yang ada, fasilitator juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi dan partisipasi aktif.

Menurut (Panggabean, 1999) dalam (Achmad, 2018) baik fasilitasi maupun fasilitator memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks. Kata “fasilitasi” sendiri berasal dari *facilis* dalam bahasa Prancis, yang berarti “memudahkan”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang fasilitator berfungsi sebagai aktor kunci yang bertugas untuk

menyederhanakan berbagai proses, sehingga semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi secara maksimal. Selain itu istilah “fasilitas” mencakup segala sesuatu yang berfungsi untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan, yang bisa berupa berbagai bentuk, baik itu alat maupun sumber daya. Dengan adanya fasilitasi yang memadai, diharapkan setiap kegiatan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan memberikan hasil yang lebih optimal.

Fasilitasi dalam (Hidayati, 2021) adalah proses yang membantu individu atau kelompok mencapai tujuan. Proses ini menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Fasilitasi membuat komunikasi dan kerja sama antara anggota kelompok lebih mudah. Fasilitasi bukan hanya soal memberikan bantuan, namun juga menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi positif. Seorang fasilitator bisa mengatur pertemuan, menyusun agenda, atau memfasilitasi diskusi agar semua suara terdengar. Setiap anggota kelompok memiliki perspektif dan ide berbeda, dan fasilitasi memastikan semua pendapat dihargai.

Fasilitasi juga meningkatkan rasa saling percaya di antara anggota kelompok. Ketika orang merasa didengarkan, mereka lebih terbuka untuk berbagi ide dan bekerja sama. Dengan demikian, fasilitasi menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai pemikiran, membantu kelompok bergerak menuju tujuan bersama. Fasilitasi mencakup penyediaan alat dan sumber daya untuk mencapai tujuan, seperti pelatihan dan akses informasi. Dengan dukungan ini, individu dan kelompok bisa lebih mudah mengatasi tantangan. Dalam hal ini berarti fasilitasi adalah proses berharga yang

mendorong kolaborasi produktif dan memastikan semua anggota kelompok dapat berkontribusi secara berarti. Dengan pendekatan tepat, fasilitasi dapat membuat perbedaan besar dalam mencapai tujuan bersama dan menciptakan suasana kerja harmonis.

Selain itu, dalam (Rahman, 2020) menyatakan bahwa fasilitasi juga melibatkan pengorganisasian dan pengelolaan proses pembelajaran untuk membuatnya lebih efektif. Ini berarti bahwa seorang fasilitator tidak hanya sekadar membantu, tetapi juga bertindak sebagai pengatur yang memastikan semua elemen pembelajaran berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, fasilitasi mencakup berbagai aspek, seperti merencanakan kegiatan pembelajaran, menentukan metode yang tepat, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Fasilitator perlu memahami kebutuhan peserta agar bisa menyusun materi dan aktivitas yang sesuai.

Misalnya, jika kelompok belajar terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, fasilitator harus bisa mengakomodasi perbedaan tersebut. Ini bisa dilakukan dengan memberikan penjelasan yang jelas, menggunakan berbagai metode pengajaran, atau memfasilitasi diskusi di mana semua orang dapat berpartisipasi. Pengelolaan proses pembelajaran juga berarti mengawasi jalannya kegiatan. Fasilitator harus memperhatikan dinamika kelompok, memastikan bahwa setiap orang terlibat aktif, dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih terarah dan produktif. Secara keseluruhan, fasilitasi dalam pembelajaran bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan

dan bermanfaat bagi semua peserta. Dengan pendekatan yang tepat, fasilitasi dapat membantu peserta mencapai pemahaman yang lebih dalam dan keterampilan yang lebih baik.

Menurut (Prasetyo, 2023), fasilitasi melibatkan berbagai teknik yang digunakan untuk membantu kelompok dalam menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan. Ini berarti fasilitasi bukan hanya sekadar memberi arahan, tetapi juga melibatkan berbagai pendekatan yang mendorong partisipasi aktif dari semua anggota kelompok. Teknik-teknik ini bisa berupa cara-cara untuk mengajak diskusi, mengelola perdebatan, atau menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Misalnya, fasilitator bisa menggunakan metode brainstorming untuk mengumpulkan ide-ide dari semua anggota. Dengan cara ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Selain itu, fasilitasi juga berfungsi untuk membantu kelompok menemukan titik temu. Ketika ada perbedaan pendapat, fasilitator bisa memfasilitasi dialog yang konstruktif agar semua sudut pandang dipertimbangkan. Dengan mengarahkan pembicaraan, fasilitator dapat membantu kelompok bergerak menuju kesepakatan yang diinginkan.

Pentingnya teknik-teknik ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan suasana yang aman dan terbuka. Ketika anggota kelompok merasa nyaman untuk berbicara, mereka lebih cenderung untuk berbagi ide dan mencari solusi bersama. Ini membuat proses penyelesaian masalah menjadi lebih kolaboratif dan efektif. Secara keseluruhan, fasilitasi dengan teknik-teknik yang tepat dapat membantu kelompok tidak hanya

menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antar anggotanya. Dengan demikian, kelompok bisa mencapai konsensus yang diinginkan dan bekerja lebih harmonis ke depannya.

Fasilitasi bisa dipahami sebagai usaha untuk menciptakan suasana yang mendukung interaksi dan mendorong partisipasi aktif dari semua orang. (Setiawan, 2022) menekankan bahwa fasilitasi sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan. Ketika fasilitasi dilakukan dengan baik, itu membantu orang merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berbagi pendapat. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, fasilitator bisa mendorong semua anggota untuk aktif berkontribusi. Ini bisa melibatkan berbagai cara, seperti mengatur sesi tanya jawab, membuat kelompok kecil untuk diskusi, atau menggunakan teknik ice-breaking agar suasana lebih santai.

Selain itu, fasilitasi juga membantu memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai. Dalam sebuah diskusi, terkadang ada anggota yang lebih dominan, sementara yang lain mungkin ragu untuk berbicara. Fasilitator berperan untuk menyeimbangkan situasi ini, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Dengan cara ini, fasilitasi tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga membantu menciptakan keputusan yang lebih baik. Ketika semua orang terlibat, keputusan yang diambil cenderung lebih representatif dan mencerminkan kebutuhan serta harapan kelompok. Secara keseluruhan, fasilitasi menciptakan ruang di mana setiap orang merasa dihargai dan didorong untuk berkontribusi. Ini sangat penting

dalam membangun rasa kebersamaan dan memastikan bahwa proses diskusi dan pengambilan keputusan berjalan dengan baik.

Fasilitasi dianggap sebagai keterampilan yang sangat penting bagi pemimpin dalam mengelola dinamika kelompok. Menurut (Wulandari, 2021), seorang fasilitator perlu bisa menciptakan suasana yang mendukung diskusi dan kerja sama antar anggota. Seorang fasilitator yang baik harus mampu membuat semua orang merasa nyaman untuk berbicara. Ini berarti mereka perlu memperhatikan bagaimana suasana saat diskusi berlangsung, memastikan tidak ada yang merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, fasilitator bisa mendorong anggota kelompok untuk lebih aktif berpartisipasi. Selain itu, fasilitator juga harus pandai dalam mengelola perbedaan pendapat. Dalam sebuah kelompok, pasti ada berbagai perspektif yang muncul, dan tugas fasilitator adalah membantu mengarahkan diskusi agar tetap produktif. Mereka harus bisa memfasilitasi dialog yang konstruktif, sehingga semua ide dapat dibahas tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu.

Kemampuan ini sangat penting karena dapat memengaruhi hasil akhir dari sebuah diskusi atau proyek. Jika suasana diskusi kondusif, maka kolaborasi antar anggota kelompok akan lebih lancar dan efektif. Hal ini pada akhirnya akan membantu kelompok mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih terintegrasi. Secara keseluruhan, keterampilan fasilitasi adalah aset berharga bagi pemimpin. Dengan kemampuan ini, mereka dapat mengelola kelompok dengan lebih baik, menciptakan pengalaman

yang positif, dan memastikan bahwa setiap anggota merasa terlibat dan dihargai.

Berdasarkan uraian di atas, fasilitasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang berfokus pada cara pelaksanaan suatu kegiatan, dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efektivitas interaksi di antara individu atau kelompok. Peran fasilitator sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, komunikasi, dan partisipasi aktif, sehingga semua pihak merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menjalani proses tersebut. Selain itu, fasilitasi juga mencakup penyediaan berbagai fasilitas yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk sumber daya, alat, maupun dukungan finansial. Dengan demikian, fasilitasi berperan penting dalam memastikan bahwa tujuan dari suatu usaha dapat tercapai dengan lebih efisien dan optimal.

3. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan tindakan pengurangan resiko bencana. Dalam (Faturahman, 2018) menyebutkan bahwa mitigasi bencana yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko dan konsekuensi dari bencana, seperti bencana alam (meteorologi dan geologi) dan bencana sosial. Mitigasi terdiri dari tindakan yang diambil sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi (BPBD KLATEN, 2023).

Mitigasi bencana (BNPB, 2017) adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko serta dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana. Tujuan utama dari mitigasi adalah untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman bencana yang bisa terjadi. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup berbagai upaya, seperti membangun infrastruktur yang tahan bencana, menerapkan kebijakan penggunaan lahan yang bijaksana, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menghadapi situasi darurat. Semua tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian, baik itu dalam bentuk kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, maupun gangguan terhadap layanan publik.

Mitigasi bencana juga melibatkan pengumpulan data dan analisis risiko untuk memahami potensi bahaya yang ada di suatu daerah. Dengan informasi ini, langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif dapat dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Mitigasi bencana adalah usaha yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tangguh. Dengan melakukan mitigasi yang baik, kita dapat mengurangi kemungkinan dampak negatif dari bencana dan membantu masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi risiko yang ada.

Dalam (BPBD Kab Brebes, 2022) siklus mitigasi bencana dibagi menjadi tiga yaitu pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Tujuan dari mitigasi bencana yaitu meminimalisir resiko saat bencana, pedoman bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan pembangunan,

membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai resiko yang ada saat terjadi bencana, dan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat saat harus menghadapi bencana.

Mitigasi Pra Bencana merupakan upaya pertama yang dapat dilakukan untuk meminimalisir korban jiwa. Organisasi terkait atau pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan edukasi dan masyarakat dapat lebih bersiap saat menghadapi bencana.

Mitigasi Saat Bencana, dalam hal ini biasanya juga disebut tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini merupakan tahap untuk menyelamatkan diri sendiri ataupun orang terdekat. Namun yang perlu digaris bawahi, saat hendak melakukan penyelamatan kepada orang lain harus sudah memastikan bahwa tidak membahayakan keselamatan diri sendiri.

Mitigasi Pasca Bencana merupakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Terjadinya bencana dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan bangunan, baik bangunan fasilitas umum maupun bangunan rumah warga bahkan terkadang juga banyak menelan korban jiwa. Pada tahap mitigasi pasca bencana ini merupakan tahap untuk memperbaiki bangunan dan jalan yang rusak, serta memperbaiki mental para korban bencana yang mengalami trauma.

Secara keseluruhan, mitigasi bencana merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan konsekuensi dari bencana. Upaya mitigasi bencana terbagi menjadi tiga tahap, yaitu pra

bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Mitigasi bencana memiliki tujuan penting, yaitu meminimalkan risiko selama terjadinya bencana, memberikan panduan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam pelaksanaannya, mitigasi bencana melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi terkait dan pemerintah, yang bekerja sama untuk melindungi nyawa, mengurangi kerugian, dan memulihkan kondisi setelah bencana terjadi. Upaya mitigasi bencana merupakan bagian penting dari strategi yang komprehensif dalam mengurangi kerugian manusia dan kerusakan infrastruktur akibat bencana.

Dari uraian tersebut, upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam (BPBD Kab Brebes, 2022) meliputi:

a. Pra Bencana

Pada fase pra bencana, pemerintah desa perlu aktif memantau aktivitas gunung berapi yang berpotensi meletus melalui pengumpulan data geologi, geofisika, dan geokimia untuk memahami aktivitas gunung. Selain itu, penting untuk menyediakan peta yang menunjukkan kawasan rawan bencana dan zona risiko, termasuk jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang aman. Edukasi masyarakat juga menjadi kunci, dengan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda erupsi serta langkah-langkah evakuasi yang harus diambil.

b. Saat Bencana

Saat bencana terjadi, penting untuk melaksanakan rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya guna memindahkan penduduk dari zona berbahaya ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, penyediaan perlengkapan darurat seperti masker anti debu, obat-obatan, serta makanan dan air bersih menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan selama proses evakuasi.

c. Pasca Bencana

Pada fase pasca bencana, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap dampak bencana yang ditimbulkan melalui proses pemulihan infrasutuktur serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu, penting untuk mengadakan sesi edukasi pasca bencana agar masyarakat memahami langkah-langkah pemulihan dan cara menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang. Pengembangan kebijakan berkelanjutan juga diperlukan dengan mengkaji kembali kebijakan mitigasi yang ada berdasarkan pengalaman dari bencana sebelumnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan.

Dalam mitigasi bencana, pemerintah desa dapat melakukan serangkaian upaya-upaya yaitu:

a. Pemetaan Risiko Bencana

Pemetaan risiko bencana (BNPB, 2017) adalah langkah penting yang dilakukan untuk mengenali dan menganalisis berbagai potensi

bahaya, kerentanan, serta kapasitas yang ada di suatu daerah. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana. Dalam pemetaan risiko bencana, yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi mengenai berbagai faktor yang dapat memengaruhi keamanan masyarakat. Hal ini termasuk mengidentifikasi jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi, seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan, serta memahami seberapa rentan wilayah tersebut terhadap bencana-bencana tersebut. Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghadapi bencana. Ini mencakup infrastruktur yang ada, kesiapan tim tanggap darurat, dan sumber daya yang tersedia untuk membantu warga saat bencana terjadi. Melalui pemetaan risiko bencana, diharapkan dapat ditemukan solusi dan strategi yang tepat untuk mengurangi potensi kerugian dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, proses ini tidak hanya membantu dalam persiapan menghadapi bencana, tetapi juga dalam membangun kesadaran dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi situasi darurat.

b. Koordinasi dan Kerjasama

Koordinasi dan kerja sama (Sukardi, 2020) dalam mitigasi bencana melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk

mengurangi risiko bencana. Dalam konteks ini, setiap pihak memiliki peran penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan menyediakan dukungan yang diperlukan, sementara masyarakat dapat memberikan wawasan tentang kondisi lokal dan kebutuhan mereka. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah sering kali memiliki keahlian khusus dan pengalaman dalam menangani situasi bencana, sehingga mereka bisa menjadi mitra yang berharga. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat saling melengkapi. Misalnya, pemerintah bisa menyediakan dana dan infrastruktur, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan pengetahuan lokal dan partisipasi aktif. Organisasi non-pemerintah bisa membantu dalam pelatihan dan pendidikan, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Kerjasama ini juga penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Dengan melibatkan semua elemen, tindakan mitigasi menjadi lebih menyeluruh dan terarah, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua orang. Secara keseluruhan, koordinasi dan kerjasama dalam mitigasi bencana bukan hanya tentang berbagi sumber daya, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini merupakan kunci untuk menciptakan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman bencana.

c. Reskontruksi

Rekonstruksi (BNPB, 2016) adalah proses pemulihan yang dilakukan setelah terjadinya bencana, dengan tujuan untuk membangun kembali infrastruktur, rumah, dan fasilitas publik yang telah rusak. Selain itu, rekonstruksi juga bertujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Setelah bencana, banyak aspek kehidupan masyarakat yang terganggu, mulai dari tempat tinggal hingga layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, rekonstruksi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Proses ini tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem sosial dan ekonomi yang ada. Dalam rekonstruksi dengan melibatkan warga, proses ini juga bisa memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang dibangun kembali. Selain itu, rekonstruksi juga bisa menjadi kesempatan untuk menerapkan praktik yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Misalnya, membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana di masa depan atau meningkatkan akses terhadap layanan publik. Dengan cara ini, rekonstruksi tidak hanya sekadar mengembalikan apa yang hilang, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi semua. Secara keseluruhan, rekonstruksi adalah langkah krusial dalam pemulihan setelah bencana. Ini merupakan proses yang kompleks, tetapi jika dilakukan dengan baik, dapat membawa manfaat jangka

panjang bagi masyarakat dan membantu mereka bangkit kembali dengan lebih kuat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki sifat deskriptif yang cenderung mencari hasil makna dari data yang didapatkan dari penelitian. Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam (Safarudin, Zulfamanna, Kustati, & Sepriyanti, 2023) adalah salah satu jenis penelitian di bidang pendidikan yang mengandalkan pandangan dan pengalaman dari partisipan atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti biasanya melakukan wawancara yang mendalam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum untuk menggali informasi lebih banyak.

Dalam penelitian Pemerintah Desa dalam Fasilitasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dengan metode kualitatif ini nantinya akan mendeskripsikan pemerintah desa dalam fasilitasi mitigasi bencana dengan cara melakukan pengumpulan data yang akan diolah agar dapat mendeskripsikan fasilitasi Pemerintah Desa Kepuharjo dalam mitigasi bencana Gunung Merapi.

2. Unit Analisis

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama untuk menemukan data dalam penelitian ini. Dalam menentukan narasumber penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* merupakan pengumpulan sample yang dilakukan dengan dasar pertimbangan terhadap topik penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Lurah Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.
- 2) Perangkat Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.
- 3) Masyarakat Kalurahan Kepuharjo.

Tabel 1. 1
Data Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Heri Suprapto	Laki-laki	Lurah
2	Wiyono Suhadi	Laki-laki	Kamituwo
3	Pramuji	Laki-laki	Pengripta
4	Suroto	Laki-laki	Komunitas Cokro
5	Arif Hidayat	Laki-laki	Masyarakat
6	Sri Mulyani	Perempuan	Masyarakat

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah fasilitasi pemerintah desa sebagai entitas dalam mengelola dan melaksanakan mitigasi bencana di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi. Peneliti akan terjun ke lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana upaya fasilitasi pemerintah desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Observasi dalam penelitian ini yaitu observasi secara langsung kepada beberapa partisipan untuk mengetahui pemerintah desa dalam fasilitasi mitigasi bencana gunung merapi yang mencakup kemampuan pemerintah desa dalam perencanaan evakuasi, pengorganisasian sistem peringatan dini, pemantauan aktivitas vulkanik, dan penanganan pasca bencana yang dilihat dari sisi pemerintahan.

b. Wawancara

Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara yang ditujukan untuk pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat dalam kebijakan mitigasi bencana khususnya bencana letusan Gunung Merapi di Kalurahan Kepuharjo. Hal ini bertujuan agar hasil wawancara dapat dikembangkan dan dijadikan sample untuk penelitian yang sudah ditentukan.

c. Dokumen

Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan dokumen sebagai data dalam keseluruhan penelitian yang dimasukkan secara tertulis.

Dokumen yang dimaksud adalah hasil wawancara, foto catatan penelitian, dokumen kebijakan, dan foto hasil pelaksanaan program mitigasi bencana Gunung Merapi di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan megumpulkan data yang sudah dilakukan dilapangan, kemudian melakukan reduksi data yang sesuai dengan kebutuhan dalam konteks penelitian yang sudah ditentukan.

- a. Reduksi data, dimana akan menyortir seluruh data yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mendapatkan data pokok yang ada hubungannya dengan fokus penelitian (Rezkia, 2020).
- b. Display data, menyederhanakan data mentah agar lebih sentral dan menambahkan materi agar data dapat mudah diketahui dengan makna sesuai dengan konteks penelitian (Rezkia, 2020).
- c. Verifikasi, melakukan pengujian terhadap data yang sudah didapat dari hasil penelitian, sehingga dapat diketahui kebenaran hasil analisis dalam penelitian yang diambil (Rezkia, 2020).

BAB II

BENCANA GUNUNG MERAPI DI KEPUHARJO

A. Sejarah Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi

Sejarah aktivitas vulkanik Gunung Merapi dapat ditelusuri kembali ke sekitar 400.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu gunung berapi paling aktif dan paling diteliti di dunia. Sejak masa prasejarah, gunung ini telah menjadi bagian integral dari ekosistem dan budaya masyarakat di sekitarnya. Aktivitas vulkanik yang terus-menerus membentuk lanskap, menciptakan tanah subur yang mendukung pertanian yang kaya, tetapi juga menimbulkan risiko yang tidak dapat diabaikan.

Letusan besar yang tercatat pertama kali terjadi pada tahun 1548, ketika lava dan material vulkanik menyapu pemukiman dan ladang di sekitarnya, menyebabkan kerusakan parah dan menewaskan banyak orang. Peristiwa ini menjadi titik awal kesadaran masyarakat akan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh gunung berapi. Sejak saat itu, catatan sejarah dan lisan tentang Merapi mulai berkembang, dengan banyak legenda dan mitos yang muncul di kalangan penduduk lokal yang menggambarkan gunung ini sebagai entitas yang sakral dan sekaligus menakutkan.

Letusan yang paling dikenal oleh masyarakat luas adalah yang terjadi pada tahun 1930. Letusan ini berlangsung dengan kekuatan yang sangat besar, mengeluarkan awan panas dan material vulkanik yang menghancurkan sejumlah desa dan mengakibatkan lebih dari 1.300 orang kehilangan nyawa. Dampak dari letusan ini tidak hanya terasa pada aspek fisik, tetapi juga

menciptakan trauma mendalam bagi masyarakat yang selamat. Proses pemulihan yang panjang harus dilalui, dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan mereka. Pengalaman ini menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan perlunya sistem peringatan dini.

Setelah letusan 1930, Gunung Merapi terus menunjukkan aktivitasnya dengan frekuensi yang meningkat. Pada tahun 1994, gunung ini kembali meletus, memaksa banyak penduduk di kawasan lereng gunung untuk dievakuasi secara mendesak. Peristiwa ini mencerminkan betapa berbahayanya gunung berapi ini bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, serta menyoroti perlunya sistem pemantauan yang lebih baik. Sejak saat itu, ilmuwan mulai melakukan penelitian lebih mendalam tentang pola aktivitas vulkanik Merapi, berusaha memahami tanda-tanda awal yang dapat mendeteksi letusan.

Memasuki abad ke-21, letusan yang terjadi pada tahun 2006 dan 2010 menjadi titik balik dalam pengelolaan risiko bencana di kawasan tersebut. Letusan 2010, yang merupakan salah satu yang paling besar dalam sejarah Merapi, menyebabkan lebih dari 350.000 orang dievakuasi dan merusak infrastruktur yang luas, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Kejadian ini menyebabkan pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan upaya dalam mitigasi bencana, termasuk peningkatan sistem peringatan dini dan pelatihan bagi masyarakat tentang cara menghadapi situasi darurat.

Selama periode ini, banyak penelitian dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang aktivitas vulkanik Merapi. Para ilmuwan dan peneliti bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan peta

risiko dan strategi evakuasi yang lebih efektif. Pendidikan tentang bahaya vulkanik juga menjadi fokus, dengan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi diri. Dengan demikian, sejarah aktivitas vulkanik Gunung Merapi bukan hanya sekadar catatan letusan, tetapi juga sebuah pelajaran berharga mengenai ketahanan masyarakat dan pentingnya mitigasi bencana.

B. Erupsi Gunung Merapi 2010

Kalurahan Kepuharjo, yang terletak di lereng Gunung Merapi, merupakan salah satu daerah yang paling rentan terhadap aktivitas vulkanik yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat. Dengan lokasi yang berisiko, kawasan ini sering kali menghadapi berbagai bencana seperti erupsi, hujan lahar, dan tanah longsor. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi tidak hanya menimbulkan ancaman fisik, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi penduduk setempat.

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 adalah salah satu bencana vulkanik yang paling besar dalam sejarah aktivitas gunung berapi di Indonesia. Terletak di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah, Gunung Merapi dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, dengan riwayat letusan yang panjang dan berulang. Proses erupsi ini dimulai pada awal Oktober 2010, ketika para ahli geologi dan vulkanologi mengidentifikasi adanya peningkatan yang signifikan dalam aktivitas seismik serta perubahan-perubahan fisik pada permukaan gunung, yang menjadi indikasi kuat bahwa

letusan besar mungkin akan segera terjadi. Seiring waktu, gejala vulkanik semakin terlihat jelas. Munculnya gas beracun dan suara gemuruh dari dalam perut bumi menjadi tanda bahwa kondisi di dalam gunung semakin mendesak.

Pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi mengalami puncak erupsi yang sangat kuat, yang menghasilkan awan panas berbahaya serta semburan material vulkanik yang menjulang tinggi ke udara. Erupsi ini memiliki dampak yang sangat merusak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Merapi, khususnya di wilayah Kalurahan Kepuharjo. Hampir seluruh bangunan, jalan, dan pepohonan di daerah tersebut tersapu habis oleh awan panas yang bergerak dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak kehancuran.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh erupsi ini sangat fatal. Banyak rumah warga yang hancur, dan infrastruktur seperti jalan raya serta jembatan mengalami kerusakan parah. Seluruh wilayah Kepuharjo ini terdampak awan panas, lahar panas, hujan abu vulkanik dan material vulkanik lainnya seperti pasir dan batu. Delapan padukuhan yang terkena awan panas yaitu Kaliadem, Petung, Jambu, Kopeng, Batur, Kepuh, Pagerjurang dan Manggong.

Namun, sebelum puncak erupsi terjadi, warga di Kalurahan Kepuharjo telah diungsikan ke barak-barak pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Semua warga Kepuharjo di evakuasi, dan pengungsian tersebar pada radius yang sangat luas dengan lama mengungsi lebih kurang 2 bulan. Proses evakuasi ini dilakukan sebagai langkah pencegahan setelah tanda-tanda aktivitas vulkanik mulai muncul, meskipun banyak juga yang terpaksa meninggalkan harta benda mereka.

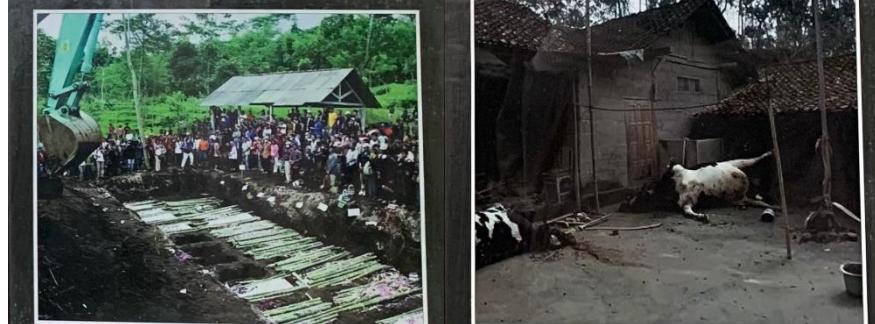
Meskipun tindakan evakuasi ini menyelamatkan banyak nyawa, namun dampak erupsi tetap sangat merusak. Banyak pepohonan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, seperti tanaman pertanian, juga musnah akibat terjangan awan panas dan hujan abu vulkanik. Banyak ternak milik warga yang tidak sempat dievakuasi juga menjadi korban dari erupsi Merapi. Hewan-hewan tersebut terjebak dalam awan panas dan tidak dapat diselamatkan.

Pada erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010, Mbah Marijan, juru kunci gunung yang sangat dihormati dan merupakan simbol spiritual bagi masyarakat sekitar, juga menjadi korban tragis dari bencana alam ini. Mbah Marijan dikenal luas sebagai sosok yang memiliki hubungan erat dengan Gunung Merapi, menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, serta menjaga tradisi dan ritual yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Meskipun saat itu telah ada peringatan dan upaya evakuasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, Mbah Marijan memilih untuk tetap tinggal di tempatnya. Ia merasa terikat oleh tanggung jawab spiritual dan budaya, serta keyakinan bahwa kehadirannya di sana adalah penting untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan masyarakat. Keputusan ini, meskipun didorong oleh niat baik, berujung pada tragedi ketika awan panas dan material vulkanik menyapu area tersebut dengan cepat. Kehilangan Mbah Marijan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Ia bukan hanya seorang juru kunci, tetapi juga sosok yang menjadi panutan dan pengayom bagi banyak orang. Korban erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 tidak hanya Mbah Marijan, tetapi erupsi ini menyebabkan lebih dari

300 korban jiwa, termasuk manusia dan hewan ternak. Ribuan hewan ternak ternak hilang atau mati selama bencana tersebut.

Gambar 2. 1
Korban Erupsi Merapi 2010



Erupsi ini berlangsung hingga 5 November, menghasilkan hujan abu yang melanda kawasan sekitarnya, termasuk kota Yogyakarta dan daerah lainnya. Akibatnya, kehidupan sehari-hari masyarakat terganggu secara signifikan, dengan banyak orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan berhadapan dengan tantangan baru akibat dampak dari bencana ini.

Setelah erupsi Merapi mereda, hampir seluruh wilayah Kalurahan Kepuharjo terdampak dan warga kehilangan rumahnya, maka disediakan hunian sementara. Hunian sementara atau shelter ini merupakan bangunan non permanen yang terbuat dari anyaman bambu. Untuk warga Kepuharjo, shelter ini terletak di Kalurahan Wukirsari. Warga mencoba kembali beraktifitas dengan normal di Shelter ini.

Gambar 2. 2
Hunian Sementara/Shelter



Namun karena area terdampak memang tidak bisa dan tidak boleh dibangun kembali maka warga di relokasi dan di sediakan tempat untuk membuat Hunian Tetap. Untuk wilayah Kepuharjo terbagi menjadi 2 tempat. Padukuhan Jambu, Batur dan Kopeng berada di Tanah Kas Desa di Dusun Batur. Padukuhan Kaliadem, Petung, Pagerjurang, Kepuh dan Manggong berada di Tanah Kas Desa di Dusun Pagerjuang.

Gambar 2. 3 Hunian Tetap Batur dan Pagerjurang



Status Gunung Merapi saat ini dibagi menjadi empat level, yaitu Aktif Normal, Waspada, Siaga, dan Awas. Sejak 5 November 2020, BPPTKG Yogyakarta telah menetapkan status Gunung Merapi menjadi Siaga, yang menandakan adanya peningkatan aktivitas vulkanik yang perlu diperhatikan

oleh masyarakat sekitar. Penetapan ini merupakan hasil dari pengamatan yang cermat terhadap gejala-gejala yang ditunjukkan oleh gunung berapi tersebut, seperti gempa vulkanik dan deformasi tanah. Status Siaga ini tidak hanya berdampak pada tingkat kewaspadaan masyarakat, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pertanian, dan kegiatan sehari-hari. Masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol keselamatan dan mengikuti arahan dari otoritas setempat agar dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Pada periode ini, Gunung Merapi mengalami erupsi efusif yang ditandai dengan pertumbuhan kubah lava yang relatif stabil. Erupsi efusif ini berbeda dari erupsi eksplosif, karena lebih banyak menghasilkan aliran lava yang mengalir perlahan daripada letusan yang mengeluarkan material ke udara. Beberapa tanggal penting mencatat aktivitas erupsi ini, dimulai dari 5 November 2020, ketika status Siaga resmi diumumkan. Ini menjadi sinyal bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi mereka yang tinggal di lereng gunung. Pada 30 November 2020, terjadi aliran lava yang signifikan, yang semakin memperkuat keprihatinan akan potensi bahaya yang lebih besar di masa depan. Pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa pertumbuhan kubah lava terus berlanjut, dan pada 1 Januari 2021, aktivitas vulkanik kembali terdeteksi, menambah kompleksitas situasi. Aktivitas erupsi efusif yang terjadi pada 28 Juni 2021 menunjukkan bahwa meskipun ada stabilitas, tetap ada potensi ancaman yang perlu diantisipasi oleh masyarakat.

Hingga tahun 2025, status Gunung Merapi masih ditetapkan sebagai Siaga karena aktivitas vulkanik yang terus dipantau menunjukkan

pertumbuhan kubah lava yang stabil dan adanya potensi erupsi efusif. Meskipun telah terjadi beberapa aliran lava, kondisi ini menandakan bahwa meskipun stabil, masih ada ancaman yang dapat berpotensi membahayakan masyarakat di sekitar lereng gunung. Pemantauan yang intensif masih tetap dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat serta mengurangi risiko yang mungkin muncul akibat aktivitas vulkanik yang tidak terduga.

BAB III

PEMERINTAH KALURAHAN KEPUHARJO DALAM MITIGASI

BENCANA GUNUNG MERAPI

Setelah menyelesaikan proses penelitian dan pengumpulan data dengan cermat, langkah berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, tujuan utama dari analisis data adalah untuk menyusun dan mengorganisir seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumen. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data pokok yang relevan dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Penelitian ini meilih fasilitasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui tiga hal yaitu pemetaan resiko bencana, koordinasi dan kerjasama, reskontruksi.

A. Pemetaan Risiko Bencana

Pemerintah Desa Kepuharjo, dalam fasilitasi mitigasi bencana yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Merapi, melaksanakan serangkaian inisiatif yang dirancang dengan cermat dan strategis. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penyusunan dan implementasi rencana kontinjensi yang komprehensif, yang memuat prosedur evakuasi, identifikasi jalur aman, serta penetapan tempat pengungsian yang strategis. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo memiliki upaya untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana, mulai pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo melakukan identifikasi dan pemetaan resiko bencana.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Kamituwo Wiyono Suhadi.

“Kalau dalam rangka identifikasi dan pemetaan resiko bencana di Kalurahan Kepuharjo itu lewat program Destana atau Desa Tangguh Bencana, itu membentuk yang namanya rencana kontinjensi yang khusus untuk erupsi Gunung Merapi. Dalam hal ini kami membentuk yang namanya FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) tujuannya adalah yang jelas ketika ada bencana kita selaku FPRB sudah tahu apa yang akan dilakukan karena sudah dirumuskan semua di dalam Rencana Kontinjensi. Penyusunan rencana kontinjensi ini diawali dengan pemetaan padukuhan sehingga nanti bisa nyatu dari 8 padukuhan.” (Wawancara 11 Februari 2025)

Hasil wawancara ini mengungkapkan upaya identifikasi dan pemetaan risiko bencana yang dilakukan di Kalurahan Kepuharjo melalui program Destana atau Desa Tangguh Bencana, yang bertujuan untuk membentuk rencana kontinjensi khusus menghadapi erupsi Gunung Merapi. Dalam proses ini, dibentuklah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi bencana, sehingga anggota forum sudah memiliki pedoman yang jelas berdasarkan Rencana Kontinjensi yang telah dirumuskan. Penyusunan rencana tersebut diawali dengan pemetaan padukuhan, yang melibatkan delapan padukuhan di wilayah tersebut agar strategi yang dihasilkan dapat terintegrasi dan efektif, memberikan kesiapan yang lebih baik bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Dengan adanya rencana yang jelas, FPRB diharapkan dapat mengimplementasikan tindakan yang tepat dan terkoordinasi, sehingga meningkatkan ketangguhan terhadap bencana yang mungkin terjadi.

Gambar 3. 1 Sosialisasi dan Kontijensi Bencana Erupsi Merapi 2022



Sumber: Website Kepuharjo

Pemerintah Kalurahan Kepuharjo juga memiliki program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Pengripta Pramuji.

“Jadi untuk program atau kebijakan khusus yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Kepuharjo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana Gunung Merapi, biasanya program ini bersinergi bersama BPBD Kabupaten Sleman dimana program-program ini berupa peningkatan kapasitas untuk FPRB yang terdiri dari relawan, kepala seksi, dan sebagainya diadakan penguatan kapasitas, seperti pelatihan, pembinaan, atau forum-forum jagongan bareng untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan mitigasi bencana baik dari dusun maupun kalurahan”(Wawancara 11 Februari 2025)

Pernyataan dari Bapak Lurah Heri Suprapto adalah sebagai berikut

“Kebijakan dari Pemerintah Kalurahan Kepuharjo selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa di atas itu boleh membangun gubug atau rumah, kandang sapi, perkebunan, dan di atas juga banyak sekali pariwisata, tetapi dengan catatan seandainya BPPTKG menyatakan disitu level 4 atau Awas, di sana harus di kosongkan, bukan berarti tidak boleh diam diatas mbak, tetapi pada level 1,2, dan 3. Istilahnya kita disini *living harmony*, yang berarti masyarakat harus tanggap terhadap kebencanaan dan harus paham dengan karakter Gunung Merapi” (Wawancara 11 Februari 2025)

Dalam wawancara dengan Bapak Pengripta Pramuji, terungkap bahwa program-program ini berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan forum yang melibatkan masyarakat, relawan dan beberapa pihak

terkait. Sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan program ini, yang bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mitigasi risiko bencana.

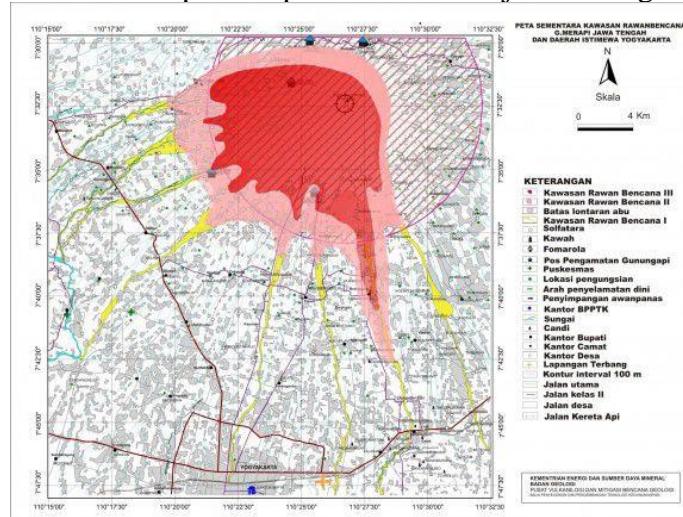
Sementara itu, Bapak Lurah Heri Suprapto menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang responsif terhadap status risiko bencana, dengan mengizinkan masyarakat untuk membangun di kawasan tertentu selama tidak berada pada level awas yang ditetapkan oleh BPPTKG. Konsep *living harmony* yang diusung mencerminkan upaya untuk mengedukasi masyarakat agar tetap tanggap dan memahami karakteristik Gunung Merapi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan aman meskipun berada di daerah rawan bencana. Kalurahan Kepuharjo tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap risiko bencana.

Rencana kontinjensi atau proses identifikasi dan penyusunan rencana kegiatan kesiapsiagaan yang dimiliki Kalurahan Kepuharjo ini berfungsi untuk menghadapi situasi darurat. Rencana kontinjensi ini dapat diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan akan terjadi. Perencanaan kontijensi ini merupakan pedoman tanggap darurat yang cepat dan efektif, yang kemudian akan dilanjutkan rencana operasi yang merupakan aktivitas riil dari rencana tersebut.

Dalam dokumen Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi Desa Kepuharjo 2019 terdapat skenario potensi kejadian bencana. Dalam dokumen ini disebutkan sesuai dengan prakiraan BPPTKG Yogyakarta, skenario letusan Gunung Merapi kedepan memiliki jarak luncuran awan panas di Sungai

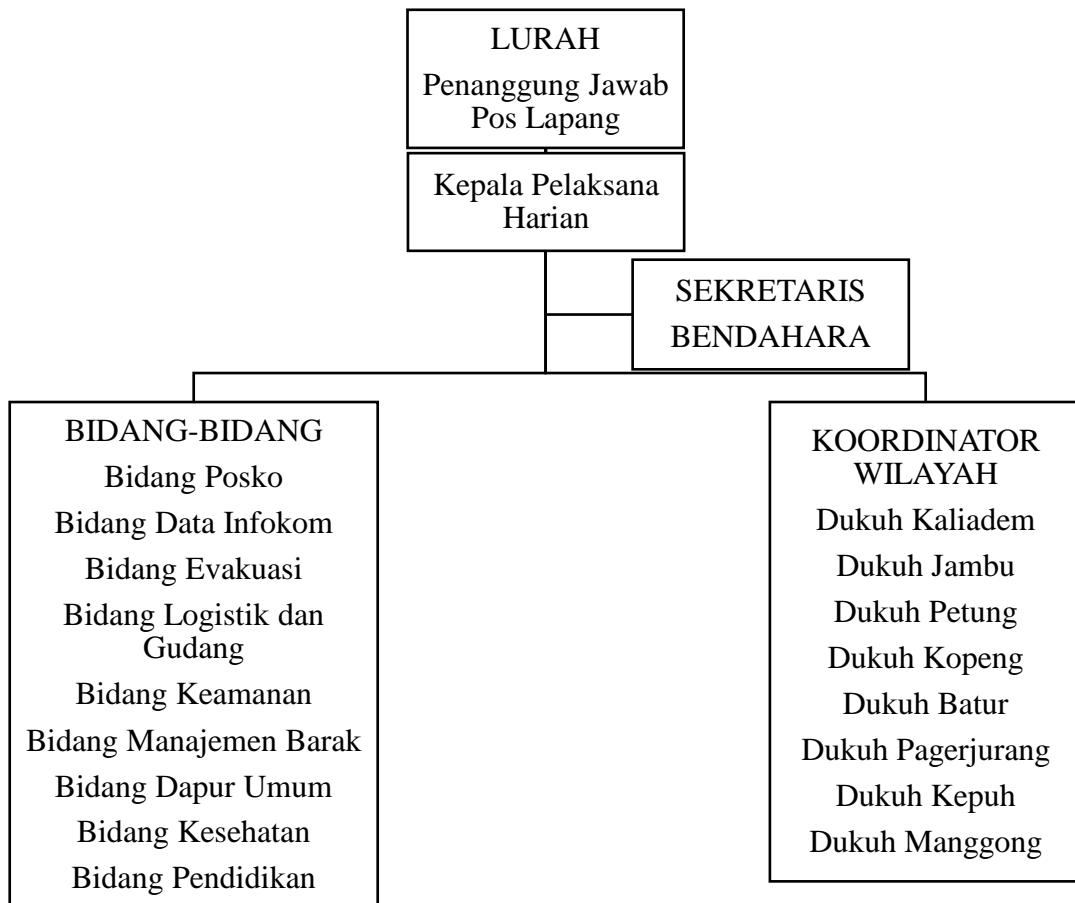
Gendol dan Sungai Opak sejauh 9km, sehingga zona aman lebih dari 11km. Analisis ini berdasarkan bukaan kawah kearah selatan-tenggara, kondisi tebing di kanan dan kiri rapuh, dan letusan 2010 material guguran besar melimpas ke Sungai Gendol dan Opak serta menutup Dusun Kaliadem. Melalui skenario potensi letusan Gunung Merapi ini terdapat beberapa wilayah yang terancam awan panas yaitu, bekas wilayah Padukuhan Kaliadem yang merupakan lahan aktifitas keseharian dengan jarak 5km, bekas Padukuhan Jambu dan Petung yang merupakan lahan aktifitas dan lokasi wisata dengan jarak 6km, Padukuhan Kopeng dengan jarak 8km, Padukuhan Batur dengan jarak 9km, Padukuhan Kepuh, Manggong, Pagerjurang dengan jarak 10km dan wilayah Hunian Tetap Pagerjurang dengan jarak 10km.

Gambar 3. 2
Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Hujan Gunung Merapi



Sumber: Dokumen Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi Desa Kepuharjo 2019

Dalam mitigasi bencana ini, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo memiliki struktur alur komando penanganan darurat bencana erupsi Merapi, yaitu sebagai berikut:



Selain identifikasi pemetaan risiko bencana dan program kebijakan yang mendukung dalam mitigasi tahap pra bencana, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo juga mendukung adanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk proses mitigasi bencana. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Heri Suprapto.

“Kalau Desa itu bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun jalur-jalur yang ada diatas. Karena di Sleman ini ada Perda Sleman Nomor 12 kaitannya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) itu tidak boleh membangun di atas. Tapi kan lucunya di atas tidak boleh membangun tapi di atas ada wisata, ada kegiatan ekonomi warga, dan pemerintah juga minta pajaknya. Tapi tidak masalah mbak, karena sudah menjadi tugas negara, harapan kami ya Perda itu dicabut biar nanti pemerintah bisa andil besar terhadap pariwisata yang ada di Kepuharjo ini” (Wawancara pada 11 Februari 2025)

Dari pernyataan Bapak Heri di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Kepuharjo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun infrastruktur, termasuk jalur evakuasi, dengan melibatkan masyarakat setempat. Namun dalam hal ini terdapat ketidakselarasan antara regulasi dan realiata di lapangan yaitu adanya Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan merapi 2010, tidak diperbolehkan menambah sarana prasarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010. Meskipun terdapat larangan tersebut, di kawasan yang sama terdapat objek wisata dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga, yang juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Ironisnya, pemerintah masih memungut pajak dari aktivitas ekonomi tersebut, meskipun pembangunan di area tersebut dilarang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo memilih untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam membangun jalur-jalur yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas di kawasan Kepuharjo. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dari regulasi yang ada, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan infrastruktur yang aman untuk mitigasi bencana serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Arif selaku warga Kepuharjo.

“Kalau mengenai pembangunan jalan yang swadaya kami senang karena selain jalannya menjadi bagus kami juga dapat mempermudah akses evakuasi jika sewaktu waktu terjadi bencana” (Wawancara 1 Maret 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menghargai peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi juga memahami pentingnya aksesibilitas dalam konteks keselamatan. Pembangunan jalan melalui inisiatif swadaya menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses rekonstruksi, yang memperkuat rasa kepemilikan dan solidaritas di antara anggota komunitas. Dengan akses jalan yang lebih baik, masyarakat merasa lebih siap dan terlindungi menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam membantu pemerintah dalam upaya mitigasi risiko bencana, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan dan kesiapsiagaan.

B. Koordinasi dan Kerjasama

Dalam fasilitasi mitigasi bencana Gunung Merapi, pemerintah Kalurahan Kepuharjo tidak hanya fokus pada tahap pra bencana, tetapi juga secara aktif merencanakan upaya pada saat terjadi bencana. Dalam hal ini, pemerintah kalurahan berperan penting dalam mengkoordinasikan respons darurat, di mana langkah-langkah yang diambil dirancang untuk memastikan keselamatan warga dengan cepat dan efektif. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal menjadi salah satu strategi kunci, di mana masyarakat setempat dilibatkan dalam proses penanggulangan bencana. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Heri Suprapto.

“Kalau seandainya terjadi bencana, yang jelas kami akan langsung koordinasikan dengan tim untuk proses evakuasi secara menyeluruh. Kalau pas 2010 kan mengungsinya masih liar, arah tujuannya tidak jelas. Kalau yang akan datang itu sudah jelas, seandainya terjadi erupsi dengan jarak luncur hanya 8 sampai 9km bisa dievakuasi ke Barak Kepuharjo. Tetapi kalau sudah lebih dari 9km kita akan evakuasi ke Desa Penyangga yang ada di Desa Wukirsari” (Wawancara 11 Februari 2025)

Hasil wawancara ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang efektif dalam proses evakuasi saat terjadi bencana. Bapak Heri menekankan bahwa, berdasarkan pengalaman pahit dari bencana tahun 2010, di mana pengungsian berlangsung tanpa arah yang jelas, mereka kini telah mengembangkan rencana evakuasi yang lebih terstruktur. Dalam situasi darurat mendatang, mereka telah menetapkan lokasi evakuasi spesifik, seperti Barak Kepuharjo untuk jarak luncur 8 hingga 9 km, dan Desa Wukirsari sebagai desa penyangga untuk jarak yang lebih jauh. Dengan demikian, hal ini menunjukkan kemajuan pemerintah kalurahan yang signifikan dalam manajemen bencana, berlandaskan pada pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dan kesiapsiagaan yang lebih matang untuk menghadapi tantangan di masa depan.



Sumber: Website Kepuharjo

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Pramuji selaku Pangrepta.

“Kami menyediakan jalan evakuasi, informasi, kalau informasi kami di Kepuharjo itu punya Handy Talky yang dibawa oleh teman-teman resque

atau dari SKSB, Cokro, dan Palem yang sewaktu-waktu bisa dihubungi. Kami juga berpatokan dengan informasi dari BPPTKG, jika seandainya terjadi keadaan darurat ya kita akan langsung sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan warga juga, itu kalau kaitannya dengan Gunung Merapi. Kalau musim rendheng ini kan juga ada ancaman bencana kaitannya banjir, karena di sungai gendol kan juga banyak para penambang manual maupun berizin, itu selalu kami sampaikan bahwa jika posisi atas sedang hujan dan terjadi banjir potensinya merusak jalan itu disampaikan ke komunitas-komunitas tadi, kalau kaitannya dengan banjir lahar hujan ini kami berkoordinasi dan berpatokan dengan BMKG, kami selalu memantau keadaan yang ada di puncak merapi” (wawancara 11 Februari 2025)

Berikut merupakan pernyataan Bapak Suroto selaku anggota Komunitas Cokro.

“Ya kalau kita manut dari informasi-informasi yang kami terima, kalau ada himbauan darurat kami akan bergerak untuk ikut memantau dan menunggu intruksi harus bagaimana, intinya ya kita itu berkoordinasi lewat satu pintu” (wawancara 11 Februari 2025)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Kalurahan Kepuharjo memiliki sistem yang terorganisir untuk penanganan bencana. Mereka menyediakan jalan evakuasi dan memiliki perangkat komunikasi seperti Handy Talky yang dikelola oleh tim penyelamat dan komunitas-komunitas yang ada di Kepuharjo. Informasi dari BPPTKG menjadi acuan utama dalam menghadapi situasi darurat, terutama yang berkaitan dengan potensi letusan Gunung Merapi. Selain itu, mereka juga menyadari ancaman banjir lahar dingin yang meningkat selama musim hujan, terutama di sungai Gendol yang sering menjadi lokasi aktivitas penambangan. Dalam hal ini, mereka berkomitmen untuk menyampaikan informasi kepada komunitas setempat, terutama saat terjadi hujan di daerah hulu yang berpotensi menyebabkan kerusakan jalan. Koordinasi dengan BMKG juga dilakukan untuk memantau kondisi cuaca dan potensi banjir lahar, menunjukkan upaya dalam menjaga

keselamatan warga dan mencerminkan keseriusan dan perhatian yang tinggi terhadap mitigasi bencana di wilayah Kepuharjo.

Meskipun terdapat sejumlah faktor yang mendukung upaya mitigasi bencana di Kalurahan Kepuharjo, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan program-program tersebut.

Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Lurah Heri Suprapto.

“Perbup 12 tahun 2012 itu penghambat mbak, karena kami mau membangun diatas itu tidak boleh mengeluarkan uang dari pemerintah kalau di KRB III, maka itu menghambat. Harapan kami ya Perbup itu dicabut, karena menghambat pemerintah baik dari Pemerintah Kabupaten maupun kami Pemerintah Kalurahan Kepuharjo untuk membangun disana, karena kami tidak bisa mengeluarkan uang APBD untuk membangun di KRB” (wawancara 11 Februari 2025)

Dari hasil wawancara diatas, terungkap bahwa faktor yang menghambat upaya fasilitasi Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam mitigasi bencana Gunung Merapi adalah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Yang dalam Perbup ini menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan menambah sarana prasarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010. Meskipun hal ini menjadi faktor penghambat, pemerintah kalurahan tetap berkomitmen untuk mencari solusi. Menyikapi faktor penghambat tersebut, pemerintah kalurahan bekerja sama dengan warga Kepuharjo untuk membangun infrastruktur yang mendukung, seperti jalur evakuasi atau jalan evakuasi, secara mandiri menggunakan swadaya masyarakat.

Langkah ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang siap berkontribusi demi keselamatan bersama. Masyarakat tidak hanya diajak untuk berpartisipasi, tetapi juga diberdayakan untuk

mengambil peran aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya jalur evakuasi yang dibangun secara swadaya, diharapkan masyarakat memiliki akses yang lebih baik saat terjadi bencana, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan mereka terhadap bencana yang mungkin terjadi, serta menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara warga.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi ini merupakan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya lokal. Selain itu, warga tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh pada keselamatan mereka. Hal ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, di mana masing-masing pihak saling melengkapi dan mendukung. Selain itu, pembangunan infrastruktur secara mandiri juga mencerminkan kemandirian dan kreativitas masyarakat dalam menghadapi tantangan. Dengan adanya jalur evakuasi yang memadai, diharapkan masyarakat akan lebih siap dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material.

Gambar 3. 4 Standar Operasional Prosedur Peringatan Dini



Sumber: Dokumen Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi Desa Kepuharjo 2019

Gambar 3. 5 Sistem Peringatan Dini Erupsi Merapi

Sumber: Dokumen Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi Desa Kepuharjo 2019

Dalam proses koordinasi mitigasi bencana, meskipun melibatkan banyak pihak atau lembaga lain, pemerintah kalurahan Kepuharjo memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang di wilayah tersebut, pemerintah kalurahan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik antara pemerintah kalurahan dan lembaga terkait lainnya, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan sistem mitigasi yang efektif. Dengan demikian, keberadaan pemerintah kalurahan Kepuharjo sebagai penggerak utama dalam koordinasi mitigasi bencana bukan hanya memperkuat kerjasama antar lembaga, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

C. Rekonstruksi

Selain upaya fasilitasi mitigasi pada tahap pra bencana dan saat terjadi bencana, upaya fasilitasi dalam tahap pasca terjadi bencana juga sangat

penting. Saat pasca bencana, tentunya terdapat proses rehabilitasi dan rekonstruksi jika diperlukan. Berikut merupakan pernyataan Bapak Lurah Heri Suprapto.

“Untuk rehablitasi dan rekonstruksi kami akan mengajukan terhadap pemerintah lewat BPBD baik kabupaten maupun provinsi maupun ke pusat, supaya rehabilitasi dan rekontruksinya segera pulih” (wawancara 11 Februari 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan langkah proaktif dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan lancar. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah lokal tidak hanya menunggu bantuan dari atas, tetapi aktif mencari saluran untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, koordinasi yang baik antara BPBD di berbagai level kabupaten, provinsi, hingga pusat dapat mempercepat alokasi sumber daya dan bantuan yang diperlukan. Rehabilitasi dan rekonstruksi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana di masa depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan, hasil yang lebih berkelanjutan dapat dicapai. Oleh karena itu, pernyataan Bapak Lurah tidak hanya mencerminkan suatu kebutuhan mendesak, tetapi juga visi untuk membangun ketahanan masyarakat yang lebih baik pasca-bencana. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Sri yang merupakan warga Kepuharjo dan pelaku usaha di pariwisata.

“Terutama jalur-jalur evakuasi di sini sudah baik mbak jalannya sudah halus semua, kita juga sudah punya barak dan titik kumpul evakuasi yang jelas, bagi saya itu sangat membantu” (wawancara 12 Februari 2025)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perbaikan fisik telah dilakukan dengan baik, meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan. Selain

itu, adanya barak dan titik kumpul evakuasi yang jelas mencerminkan upaya sistematis dalam perencanaan rekonstruksi yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Keberadaan infrastruktur ini tidak hanya membantu dalam situasi darurat, tetapi juga memberikan rasa aman dan percaya diri kepada warga. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi yang efektif harus mengintegrasikan elemen keselamatan dan kesiapsiagaan, menjadikan masyarakat lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang. Peningkatan kondisi ini menjadi landasan penting dalam membangun ketahanan terhadap risiko bencana.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat Kepuharjo pasca terjadi bencana. Berikut merupakan pernyataan Bapak Pengripta Pramuji.

“kalau rencana pemulihan ekonomi ya pasti ada mbak, contohnya seperti waktu erupsi 2010 itu kami langsung membuat wisata-wisata yang berada di KRB. Sedangkan sebenarnya pemerintah kabupaten melarang, tapi demi memulihkan ekonomi masyarakat ya kami buat wisata bukan berarti kami melanggar aturan pemerintah, tapi kami itu ingin warga masyarakat di Kepuharjo ini segera ada kegiatan ekonomi”(wawancara 11 Februari 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo memiliki peran dalam mengelola proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana. Langkah-langkah yang diambil tidak hanya mencakup upaya fisik untuk memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Dengan merancang program-program yang relevan dan berkelanjutan, pemerintah kalurahan berusaha memastikan bahwa masyarakat tidak hanya kembali ke keadaan semula, tetapi juga dapat mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi pasca bencana. Oleh karena itu,

Kalurahan Kepuharjo berupaya menciptakan ketahanan yang lebih baik dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan, yang pada akhirnya akan memperkuat solidaritas dan kepercayaan antara pemerintah dan warga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang ada diatas, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Dalam pemetaan risiko bencana, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo melakukan identifikasi dan pemetaan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Mereka membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang bertugas menyusun rencana kontinjensi khusus untuk menghadapi erupsi Gunung Merapi. Proses ini melibatkan pemetaan delapan padukuhan di wilayah tersebut untuk memastikan strategi mitigasi yang terintegrasi dan efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
2. Dalam koordinasi dan kerjasama, Pemerintah Kalurahan berperan penting dalam menetapkan rencana evakuasi yang jelas dan terstruktur. Mereka memastikan bahwa lokasi evakuasi sudah ditentukan berdasarkan pengalaman dari erupsi sebelumnya. Selain itu, pemerintah desa memanfaatkan perangkat komunikasi seperti Handy Talky untuk menjaga koordinasi informasi antara tim penyelamat dan masyarakat, serta menjalin sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kapasitas dan respons terhadap situasi darurat.
3. Dalam rekonstruksi, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan rehabilitasi infrastruktur yang

rusak setelah bencana. Selain itu, pemerintah desa juga mengembangkan program wisata untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca-bencana, namun terdapat tantangan yang menghambat yaitu terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012, yang membatasi pembangunan sarana prasarana di area terdampak. Meskipun demikian, pemerintah kalurahan tetap berkomitmen untuk mencari solusi dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur secara swadaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran, sebagai berikut:

Agar mempertimbangkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 menjadi lebih fleksibel dalam pembangunan infrastruktur di area yang terkena dampak bencana. Revisi ini perlu mempertimbangkan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan bisa aman dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo sebaiknya menginisiasi dialog dengan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas peraturan ini. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi, agar dapat mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memperkuat argumen untuk revisi peraturan yang lebih mendukung upaya mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2018). Fasilitasi Pembinaan Pemasaran Produk Ukm Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
- Asma, J., Mone, A., & Burhanudin. (2021, Februari). Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makasar, 1.
- Diptya, L. C. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tegalroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Universitas Diponegoro, 17-19.
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Publik.
- Helaluddin. (2018). Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Kualitatif. UIN Sultan Hasanuddin Banten.
- Hidayati, N. (2021). Peran Fasilitasi dalam Meningkatkan Komunikasi Kelompok. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(2), 123-130.
- Julius, A. M., Widyaningrum, N., Najib, A., Amirullah, A. A., Syarifah, H., Pratikno, H., . . . Widana, I. (2020, Maret). Impementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor. *Jurnal Swabumi*, 8(1).
- Khasanah, U. (2021). Analisis Mitigasi Bencana Gunung Merapi di Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
- Mahardhani, A. J., Imamudin, I. A., & Herdiawan, F. E. (2021, Juli). Upaya Mitigasi Bencana Melalui Aplikasi Dayakan Mitigation Center (DMC). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JPM/article/view/560>
- Mardikanto. (2019). Pemerintahan Desa: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 50-60.
- Maulida, A. R. (2021). Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalisuren Kecamatan Tajur Halang.
- Mujiyanto, Rajagukguk, J. R., & Prasetyo, I. (2023, Oktober). Mitigasi Bencana Berbasis Sister Village di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal Kajian Kota dan Wilayah*, 2(2).
- Najib, A., & Rahmat, H. K. (2021, Februari). Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5(1).
- Pamuji, M. H., & Widowati, E. (2021). Penerapan Program Mitigasi Bencana Lereng Gunung Merapi. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 1(2), 255-264.
- Prasetyo. (2023). Teknik Fasilitasi dalam Penyelesaian Masalah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 90-97.
- Rahman, A. (2020). Strategi Fasilitasi dan Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 45-52.
- Rezkia, S. M. (2020). Data Analysis: Teknik Analisis Data Kualitatif. DQLab. Retrieved Maret 4, 2025, from <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

- Rifai, M. A. (2024). Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif. Retrieved from <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>
- Rinawati, & Sukmawati, M. (2020, Juli). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 12(1).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2(3), 9680-9694.
- Setiawan. (2022). Fasilitasi Diskusi dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan*, 10(3), 78-85.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan desa. *Bina Mulia Hukum*, 7, 92.
- Sukardi. (2020). Peran Kerjasama dalam Mitigasi Bencana. *Jurnal Pembangunan Desa*, 4(2), 50-60.
- Supriadi. (2021). Pembangunan Desa dab Peran Pemerintah Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Tiani, F. A. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana “Sapto Manunggal” di Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
- Wahid, A., Marzuki, H. L., Latif, H. A., Prayitno, S., Ulum, M. B., Farizi, D. A., . . Muzaqqi, F. (2009, September). *Jurnal Konstitusi*. 6(3).
- Wulandari. (2021). Keterampilan Fasilitasi dalam Kepemimpinan. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen*, 2(1), 34-41.

SUMBER INTERNET

- BNPB. (2016). Pedoman Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana. Retrieved Maret 4, 2025, from https://bnpb.go.id/uploads/2016/09/Pedoman_Rekonstruksi_dan_Rehabilitasi_Pasca_Bencana.pdf
- BNPB. (2017). Pedoman Pemetaan Risiko Bencana. Retrieved Maret 4, 2025, from https://bnpb.go.id/uploads/2017/09/Pedoman_Pemetaan_Risiko_Bencana.pdf
- BPBD Kab Brebes. (2022). Pentingnya Mitigasi Bencana. Diakses 12 Oktober 2024 dari <https://bpbd.brebeskab.go.id/pentingnya-mitigasi-bencana/>
- BPBD KLATEN. (2023). Mitigasi Bencana Gempa Bumi, Simak Langkah-Langkah Mulai dari Pra, Saat, hingga Pasca Bencana. Diakses 12 Oktober 2024 dari <https://bpbd.klaten.go.id/mitigasi-bencana-gempa-bumi-simak-langkah-langkah-mulai-dari-pra-saat-hingga-pasca-bencana>

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

LAMPIRAN

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 115/PEM/J/X/2024

H a l : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

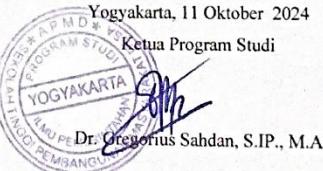
Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Diva Fajarwati
No. Mahasiswa	:	21520072
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Oktober 2024

Ketua Program Studi



SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PELOPOR DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN PENGETAHUAN DAN KONSEP
• PENGEMBANGAN MELALUI PENGETAHUAN DAN KONSEP
• PENGEMBANGAN MELALUI PENGETAHUAN DAN KONSEP
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 website www.apmd.ac.id e-mail info@apmd.ac.id

Nomor : 937/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
Di tempat.

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Diva Fajarwati
No Mhs : 21520072
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Upaya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana Gunung Merapi
Tempat : Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Desember 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170230190

SURAT TUGAS



**VAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

SURAT TUGAS

Nomor : 481/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Diva Fajarwati
Nomor Mahasiswa : 21520072
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.

a. Tempat : Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan,
Kabupaten Sleman

b. Sasaran : Upaya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana
Gurung Merapi

c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NTJ-170 230 190

PERHATIAN:

Setelah selesai melaksanakan penelitian,
mohon surat tugas ini diserahkan kepada
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON CANGKRINGAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEPUHARJO
 Pagerurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
 Laman Kepuharjo id Email desakepuharjo03@gmail.com.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 87 /V/KPH/2025

Pemerintah Desa Kepuharjo menerangkan bahwa :

Nama : Diva Fajarwati

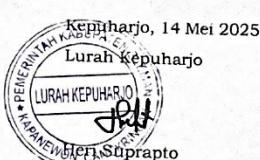
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 21520072

Instansi/Perguruan Tinggi : STPMD APMD Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan riset dan wawancara di Wilayah, Desa Kepuharjo
guna penyusunan Skripsi dengan judul :

"Pemerintah Desa Dalam Fasilitasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.



PANDUAN WAWANCARA

1. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

2. Daftar Pertanyaan

No.	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Rincian Pertanyaan	Kepada Siapa
1.	Upaya fasilitasi Pemerintah Desa Kepuharjo dalam mitigasi bencana Gunung Merapi	Apa upaya fasilitasi pada tahap pra bencana?	1. Apa saja program atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana? 2. Bagaimana pemerintah desa melakukan identifikasi dan pemetaan risiko bencana di wilayah Desa Kepuharjo?	Lurah dan Perangkat Desa Kepuharjo
			3. Apa peran pemerintah desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana sebelum terjadi bencana?	Lurah, Perangkat, dan Masyarakat Desa Kepuharjo

		<p>Apa upaya fasilitasi pada tahap saat terjadi bencana?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemerintah desa mengkoordinasikan respons darurat saat terjadi bencana? 	Lurah dan Perangkat Desa Kepuharjo
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk memastikan keselamatan warga selama bencana berlangsung? 	Lurah, Perangkat, dan Masyarakat Desa Kepuharjo
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana pemerintah desa memanfaatkan sumber daya lokal untuk membantu proses penanggulangan bencana selama saat terjadi bencana? 	Lurah dan Perangkat Desa Kepuharjo
		<p>Apa upaya fasilitasi pada tahap pasca bencana?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemerintah desa mengelola proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadi bencana? 	Lurah dan Perangkat Desa Kepuharjo
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apa upaya pemerintah desa dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana? 	Lurah, Perangkat, dan Masyarakat Desa Kepuharjo

			3. Bagaimana pemerintah desa melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai dampak bencana serta respons yang telah dilakukan?	Lurah dan Perangkat Desa Kepuharjo
2.	Faktor pendukung dan penghambat upaya fasilitasi Pemerintah Desa Kepuharjo dalam mitigasi bencana Gunung Merapi.	Apa faktor pendukung ?	<p>1. Apa faktor pendukung yang membuat pemerintah desa mampu melaksanakan program mitigasi bencana Gunung Merapi secara efektif?</p> <p>2. Apa peran infrastruktur yang ada di Desa Kepuharjo dalam mendukung upaya mitigasi bencana Gunung Merapi?</p>	Lurah dan Perangkat Desa Kepuharjo
			3. Bagaimana faktor pendukung yang ada dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana Gunung Merapi?	Lurah, Perangkat, dan Masyarakat Desa Kepuharjo
		Apa faktor penghambat	1. Apa saja faktor penghambat upaya fasilitasi pemerintah desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi?	Lurah dan Perangkat Desa Kepuharjo

		<p>2. Bagaimana pemerintah desa menyikapi penghambat yang ada dalam upaya mitigasi bencana Gunung Merapi?</p>	Lurah dan Perangkat Desa Kepuharjo
		<p>3. Apa peran masyarakat dalam mengurangi faktor penghambat upaya mitigasi bencana Gunung Merapi?</p>	Lurah, Perangkat, dan Masyarakat Desa Kepuharjo

DOKUMENTASI



Barak Pengungsian Kepuharjo



Foto Pasca Erupsi Merapi 2010



Jembatan Kepuharjo Pasca Erupsi 2010



Jembatan Kepuharjo 2025



Wawancara dengan Lurah Kepuharjo,
Bapak Heri Suprapto



Wawancara dengan Pengripta
Kepuharjo, Bapak Pramuji



Wawancara dengan Bapak Suroto



Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani